PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL HAMID**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **645675**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 666.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 168.000.000
2. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
3. Tanah Seluas 202 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
4. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 90.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 240.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA/MOBIL PENUMPANG Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOBIL, TOYOTA SIENTA 1.5 G MT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, HONDA X1B02NO4LO A/T/SCOOTER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA V1J02Q32LO A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 7.000.000

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	28.600.000
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	942.100.000
III.	HUTANG	Rp.	----
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	942.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.